



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 September 2021

Nomor : R- 42/Pres/09/2021
Sifat : Segera
Hal : Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Kepada Yth.
**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
di
Jakarta

Merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor LG/09421/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 hal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dengan ini kami menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9. Menteri Keuangan
10. Menteri Dalam Negeri